

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020

Dan

LAPORAN AUDIT INDEPENDEN

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

DAFTAR ISI

1. SURAT PERSETUJUAN IJIN CETAK ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
2. SURAT PERNYATAAN DIREKSI	2
3. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	3
4. LAPORAN KEUANGAN	
Neraca Per 31 Desember 2020 dan 2019	4
Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019	5
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019	6
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019	7
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019	8
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019	9
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Gambaran Umum	10
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	14
Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Operasional	27

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

SURAT PERNYATAAN IZIN CETAK



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
JL.HOS Cokroaminoto No.347 Pekalongan Telp.(0285)420962 SMS Gateway
085878616865
e-mail puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG
IZIN CETAK ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Dita Rasnasuri
Alamat kantor : Jl. HOS Cokroaminoto No. 347 Pekalongan

Alamat rumah : Pesindon Gg. IA No.12A Rt 1 Rw 1 Bendan Kergon Kota Pekalongan
sesuai KTP
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

Menyatakan bahwa :

Pihak Manajemen mengizinkan untuk mencetak Laporan Keuangan UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN untuk periode/tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang , 29 Maret 2021

Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan



dr. Dita Rasnasuri

NIP. 19770522 201001 2 006

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
JL.HOS Cokroaminoto No.347 Pekalongan Telp.(0285)420962 SMS Gateway
085878616865
e-mail puskpeklselatan347@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Dita Rasnasuri
Alamat kantor : Jl. HOS Cokroaminoto No.347 Pekalongan
Alamat rumah sesuai KTP : Pesindon Gg. IA No.12A Rt 1 Rw 1 Bendan Kergon
Kota Pekalongan
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPT Puskesmas Pekalongan Selatan.
2. Laporan keuangan UPT Puskesmas Pekalongan Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPT Puskesmas Pekalongan Selatan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan keuangan UPT Puskesmas Pekalongan Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam UPT Puskesmas Pekalongan Selatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Maret 2021

Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan



dr. Dita Rasnasuri
NIP. 19770522 201001 2 006

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

“TARMIZI ACHMAD”

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00132/2.0604/AU.2/11/0430/1/IV/2021

Kepada Yth :

**Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan
Jl. HOS Cokroaminoto No. 347**

Kota Pekalongan

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **BLUD - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan** terlampir, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

“TARMIZI ACHMAD”

NOMOR IZIN USAHA KAP: KEP. 09 I/KM. 6/2004

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **BLUD - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan** tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Hal Lain

BLUD - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan pola pengelolaan BLUD secara mandiri sejak tahun 2020, hal ini sesuai keputusan Walikota Nomor : 440/1205 tahun 2019.

Semarang, 30 April 2021

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“TARMIZI ACHMAD”

Prof. Dr. Tarmizi Achmad., MBA., Ak., CPA., CA., CFE
Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 0430



***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

***LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020***

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

NERACA

Per 31 Desember 2020

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2020 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	3	138,335,672
Piutang BLUD	4	70,665,000
Penyisihan Piutang Lainnya	5	(353,325)
Persediaan	6	149,801,505
Jumlah Aset Lancar		358,448,852
ASET TETAP	7	
Harga Perolehan		
Peralatan dan Mesin		516,171,916
Akumulasi Penyusutan		
Peralatan dan Mesin		(439,270,640)
Jumlah Bersih Aset Tetap		76,901,276
TOTAL ASET		435,350,128
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	8	58,773,641
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		58,773,641
EKUITAS		
Ekuitas	LPE	376,576,487
Jumlah Ekuitas		376,576,487
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		435,350,128

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Disetujui
Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

dr. Dita Rasnasuri
NIP 19770522 201001 2 006

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2020 <i>(Audited)</i>
PENDAPATAN		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat	9	1,734,477,800
Pendapatan Hibah BLUD	10	9,638,000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	11	3,250,000
Pendapatan lain-lain BLUD yang sah	12	1,498,343
Jumlah Pendapatan Operasional		1,748,864,143
BEBAN		
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	13	1,403,216,075
Beban Persediaan	14	804,969,665
Beban Jasa	15	185,210,776
Beban Pemeliharaan	16	49,767,300
Beban Penyusutan Aset	17	52,130,431
Beban Penyisihan Piutang	18	353,325
Jumlah Beban Operasional		2,495,647,572
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN		(746,783,429)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Disetujui
Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

dr. Dita Rasnasuri
NIP 19770522 201001 2 006

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2020 <i>(Audited)</i>
Ekuitas	284,183,178
Surplus/Defisit	(746,783,429)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Ekuitas - Piutang	(3,195,000)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	379,825
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Persediaan	61,033,160
Koreksi Ekuitas - Persediaan	737,122,162
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	43,836,591
Jumlah Ekuitas	376,576,487

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Arus Masuk Kas	
Pendapatan APBN	
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	1,736,582,800
Pendapatan hasil kerja sama	3,250,000
Pendapatan BLUD Lain-lain yang Sah	1,498,343
Jumlah Arus Masuk Kas	1,741,331,143
Arus Keluar Kas	
Pembayaran pegawai	1,344,442,434
Pembayaran Barang dan jasa	381,618,811
Jumlah Arus Keluar Kas	1,726,061,245
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	15,269,898
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Arus Masuk Kas	
Jumlah Arus Masuk Kas	-
Arus Keluar Kas	
Perolehan Peralatan dan Mesin	39,094,226
Jumlah Arus Keluar Kas	39,094,226
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(39,094,226)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33,595,656
Jumlah Arus Masuk Kas	33,595,656
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33,595,656
Jumlah Arus Keluar Kas	33,595,656
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	(23,824,328)
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	162,160,000
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	138,335,672

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)
PENDAPATAN			
Pendapatan BLUD Puskesmas	1,786,000,000	-	97%
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	-	1,736,582,800	
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	-	-	
Pendapatan hasil kerja sama	-	3,250,000	
Pendapatan hibah	-	-	
Pendapatan lain-lain BLUD yang sah	-	1,498,343	
Jumlah Pendapatan	1,786,000,000	1,741,331,143	97%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1,461,120,000	1,344,442,434	92%
Belanja Barang dan Jasa	409,114,000	381,618,811	93%
Jumlah Belanja Operasi	1,870,234,000	1,726,061,245	92%
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	77,926,000	39,094,226	50%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
Belanja Aset Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Modal	77,926,000	39,094,226	50%
Jumlah Belanja	1,948,160,000	1,765,155,471	91%
SURPLUS/DEFISIT LRA	(162,160,000)	(23,824,328)	15%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
SiLPA Lalu	162,160,000	162,160,000	100%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Setoran ke Kas Daerah	-		
	162,160,000	162,160,000	100%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	138,335,672	

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO PERUBAHAN ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	162,160,000
Penggunaan SAL	-
Subtotal	162,160,000
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	(23,824,328)
Subtotal	138,335,672
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-
Lain-lain	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	138,335,672

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

***CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020***

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM

1.1 Uraian Singkat

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan merupakan Unit Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kesehatan di wilayah kerjanya yang meliputi Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Soko Duwet. Sejak tahun 2013 UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan PPK BLUD Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/300 tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut untuk merespon kebijakan pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut akan bertumpu kepada fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional maka Puskesmas Kota Pekalongan harus dikelola secara profesional. Prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, benefit, dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya.

UPT Puskesmas Pekalongan Selatan menerapkan pola pengelolaan BLUD secara mandiri sejak bulan Januari tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 440/1205 tahun 2019 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Pekalongan. Pola pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas Pekalongan Selatan merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat.

1.2 Visi dan Misi

- a. Visi
Mewujudkan Masyarakat Sehat Menuju Pekalongan Selatan Sejahtera.
- b. Misi
 - 1) Menggerakkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
 - 2) Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu
 - 3) Menerapkan manajemen yang transparan dan sumber daya yang berkualitas

1.3 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja pegawai, dan untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang serta uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan Nomor **SK Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Struktur Organisasi UPT Puskesmas Pekalongan Selatan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	dr. Dita Rasnasuri	Kepala UPT Puskesmas Pkl Selatan
2	drg. Diah Retno Hapsari	Tim Mutu
3	Rina Diana, A.Md	Pelaksana Tata Usaha
4	Khomsari Yanuarita, SKM	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
5	Novi Wahyu Rina Darischa, AMK	Penanggung Jawab UKM Pengembangan
6	Mardiyah S.Kep Ns	Penanggung Jawab Jejaring
7	dr. Rahmah Esmaelia	Penanggung Jawab UKP

1.4 Dasar Hukum Penyajian Laporan Keuangan

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
- 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.
- 13) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

2.2 Dasar Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Piutang

a) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui

setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

- b) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - i. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - ii. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - iii. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - iv. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang- undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
- c) Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- d) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- e) Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

1. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
2. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
3. Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
 - a. Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkannya surat penagihan.
4. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
5. Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
6. Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman
Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah.
7. Piutang yang berasal dari Kemitraan
Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemda.
8. Piutang yang berasal dari pemberian fasilitas/jasa

Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

3) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
- c. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap berdasarkan hasil inventarisasi.
- d. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

4) **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%

3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

5) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- e) Aset Tetap Lainnya;
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- g) Akumulasi Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- a) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 5) Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- b) Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- c) Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penyusutan Aset Tetap

- a. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2. Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban :

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber dayaekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlahnetonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditian oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuanbelanja.

Pengakuan Belanja :

1) Belanja diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerahPemerintah Kota Pekalongan.

- b. Terjadinya pengeluaran kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.

- d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang

terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanjadibukukan dalam pendapatan lain- lain.

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal.

- 1) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadiaset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidakuntuk dijual.
 - c. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebihdari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang samaatau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - c. Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 2) Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- a. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- b. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- c. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- b. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- c. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- d. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (reverse) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- a. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- a. Beban diakui pada saat :
 - 1) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
 - 2) Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- b. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban

untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.

- d. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
PENJELASAN POS - POS NERACA DAN LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3 KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas (bank penerimaan BLUD) per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020
	Audited
Kas	
Kas di Bendahara Penerimaan	1,585,000
Jumlah	1,585,000
Setara Kas	
Kas di BLUD Puskesmas Rek. 3-007-252268	136,750,672
Jumlah	136,750,672
Jumlah Kas dan Setara Kas	138,335,672

4 PIUTANG BLUD

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020
	Audited
Piutang Jamkesda	-
Piutang BPJS	70,665,000
Piutang JKN (BKPM)	-
Jumlah	70,665,000

Bulan Pelayanan	Jenis Pelayanan		Status
September 2020 (Revisi)	Pra Rujukan	375,000	Sudah diverifikasi
September 2020 (Revisi)	ANC	50,000	Sudah diverifikasi
September 2020 (Revisi)	KB	360,000	Sudah diverifikasi
September 2020 (Revisi)	Keperawatan	400,000	Sudah diverifikasi
JUMLAH		1,185,000	
Oktober 2020	Perawatan	5,800,000	Sudah diverifikasi
Oktober 2020	Persalinan	12,600,000	Sudah diverifikasi
Oktober 2020	KB	1,295,000	Sudah diverifikasi
Oktober 2020	ANC	4,335,000	Sudah diverifikasi
Oktober 2020	PNC	600,000	Sudah diverifikasi
Oktober 2020	Ambulan	650,000	Sudah diverifikasi
Oktober 2020	Pra Rujukan	1,375,000	Sudah diverifikasi
JUMLAH		26,655,000	
Oktober 2020 (Revisi)	ANC	150,000	Sudah diverifikasi
Oktober 2020 (Revisi)	KB	15,000	Sudah diverifikasi
JUMLAH		165,000	
November 2020	Perawatan	3,200,000	Sudah diverifikasi
November 2020	Persalinan	11,900,000	Sudah diverifikasi
November 2020	KB	2,115,000	Sudah diverifikasi
November 2020	ANC	4,350,000	Sudah diverifikasi
November 2020	PNC	425,000	Sudah diverifikasi
November 2020	Ambulan	910,000	Sudah diverifikasi
November 2020	Pra Rujukan	1,250,000	Sudah diverifikasi
JUMLAH		24,150,000	
November 2020 (Revisi)	ANC	50,000	Sudah diverifikasi
November 2020 (Revisi)	PNC	150,000	Sudah diverifikasi
JUMLAH		200,000	
Desember 2020	Perawatan	600,000	Sudah diverifikasi
Desember 2020	Persalinan	9,100,000	Sudah diverifikasi
Desember 2020	KB	1,200,000	Sudah diverifikasi
Desember 2020	ANC	4,200,000	Sudah diverifikasi

Desember 2020	PNC	225,000	Sudah diverifikasi
Desember 2020	Ambulan	910,000	Sudah diverifikasi
Desember 2020	Pra Rujukan	1,000,000	Sudah diverifikasi
JUMLAH		17,235,000	
Desember 2020 (Revisi)	ANC	100,000	Sudah diverifikasi
Desember 2020 (Revisi)	PNC	175,000	Sudah diverifikasi
Desember 2020 (Revisi)	Keperawatan	800,000	Sudah diverifikasi
JUMLAH		1,075,000	
TOTAL PIUTANG BPJS YANG SUDAH DIVERIFIKASI		70,665,000	

5 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020
	Audited
Cadangan Kerugian Piutang	353,325
Jumlah	(353,325)

Umur Piutang	Jumlah	Persentase	Penyisihan Kerugian Piutang
0 s/d 6 Bulan	70,665,000	0.5%	353,325
> 6 s/d 12 Bulan	-	50%	-
> 12 Bulan	-	100%	-
Jumlah	70,665,000.00		353,325

6 PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020
	Audited
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-
Perabot Kantor	541,609
Jumlah	541,609
Obat-obatan	-
Obat	38,293,799
Obat-Obatan Lainnya	110,966,097
Jumlah	149,259,896
Jumlah Persediaan	149,801,505

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Penggunaan	Saldo Akhir
Bahan				
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	7,024,650	7,024,650	-
Bahan Kimia	-	6,045,000	6,045,000	-
Bahan Bakar Dan Pelumas	-	1,904,000	1,904,000	-
Bahan Baku	-	567,000	567,000	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	750,000	750,000	-
Isi Tabung Gas	-	5,975,000	5,975,000	-
Suku Cadang				
Suku Cadang Alat Angkutan	-	25,000	25,000	-
Suku Cadang Alat Pertanian	-	195,000	195,000	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Alat Tulis Kantor	-	14,159,868	14,159,868	-
Kertas Dan Cover	-	9,595,999	9,595,999	-
Bahan Cetak	-	4,963,000	4,963,000	-
Benda Pos	-	2,789,500	2,789,500	-
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	20,948,040	20,948,040	-
Bahan Komputer	-	5,340,000	5,340,000	-
Perabot Kantor	110,128.00	26,780,309	26,348,828	541,609
Alat Listrik	-	12,147,200	12,147,200	-
Survenir/ Cendera Mata	-	400,000	400,000	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	25,067,800	25,067,800	-
Obat-obatan				
Obat	40,657,322.05	336,738,732	339,102,254	38,293,799
Obat-Obatan Lainnya	20,265,710.38	365,747,913	275,047,526	110,966,097
Natura dan Pakan				
Natura	-	42,985,000	42,985,000	-

Persediaan Penelitian	-	-	-	-
Persediaan Penelitian Lainnya	-	600,000	600,000	-
Pipa				
Pipa Plastik Pvc (Upvc)	-	3,544,000	3,544,000	-
Jumlah	61,033,160.43	894,293,010	805,524,665	149,801,505

7 ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2020				
Audited				
	Saldo Awal	Kenaikan	Penurunan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Peralatan dan Mesin	376,505,332	-	-	516,171,916
Alat Ukur	-	1,800,000	-	1,800,000
Alat Timbangan/Biara	-	1,800,000	-	1,800,000
Alat Kantor	113,803,487	13,681,262	-	127,484,749
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	55,083,433	13,681,262	-	68,764,695
Alat Kantor Lainnya	58,720,054	-	-	58,720,054
Alat Rumah Tangga	127,516,413	49,067,320	6,691,057	169,892,676
Meubelair	43,888,170	29,923,320	-	73,811,490
Alat Pembersih	7,514,411	-	-	7,514,411
Alat Pendingin	41,292,145	12,193,000	-	53,485,145
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31,936,154	6,951,000	6,691,057	32,196,097
Alat Pemadam Kebakaran	2,885,533	-	-	2,885,533
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	6,750,650	-	6,750,650
Lemari dan Arsip Pejabat	-	6,750,650	-	6,750,650
Alat Studio	7,081,576	600,000	-	7,681,576
Peralatan Studio Audio	750,000	600,000	-	1,350,000
Peralatan Studio Video Dan Film	6,331,576	-	-	6,331,576
Alat Komunikasi	5,984,945	-	-	5,984,945
Alat Komunikasi Telephone	5,984,945	-	-	5,984,945
Alat Kedokteran	9,067,500	30,421,800	-	39,489,300
Alat Kedokteran Umum	9,067,500	2,675,000	-	11,742,500
Alat Kedokteran Gigi	-	14,250,000	-	14,250,000
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	13,496,800	-	13,496,800
Unit Kesehatan Umum	6,336,700	800,000	86,500	7,050,200
Alat Kedokteran Mata	-	800,000	-	800,000
Alat Kesehatan Umum Lainnya	6,336,700	-	86,500	6,250,200
Unit Alat Laboratorium	-	11,777,998	-	11,777,998
Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	-	9,227,998	-	9,227,998
Alat Laboratorium Geofisika	-	2,550,000	-	2,550,000
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-	1,800,000	-	1,800,000
Measuring/Testing Device	-	1,800,000	-	1,800,000
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1,650,000	-	-	1,650,000
Alat Kesehatan Kerja	1,650,000	-	-	1,650,000
Komputer Unit	66,989,649	27,145,111	-	94,134,760
Komputer Jaringan	49,899,318	-	-	49,899,318
Personal Komputer	17,090,331	27,145,111	-	44,235,442
Peralata Komputer	38,075,062	2,600,000	-	40,675,062
Peralatan Mini Komputer	16,723,269	-	-	16,723,269
Peralatan Personal Komputer	20,978,293	2,600,000	-	23,578,293
Peralatan Jaringan	373,500	-	-	373,500
Jumlah	376,505,332	146,444,141	6,777,557	516,171,916
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	330,067,329	-	-	439,270,640
Alat Ukur	-	360,000	-	360,000
Alat Kantor	86,378,711	22,672,946	-	109,051,657
Alat Rumah Tangga	114,693,252	49,578,339	6,691,057	157,580,534
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	6,750,650	-	6,750,650
Alat Studio	5,365,260	1,536,316	-	6,901,576
Alat Komunikasi	5,984,945	-	-	5,984,945
Alat Kedokteran	5,440,500	16,775,300	-	22,215,800
Alat Kesehatan Umum	6,336,700	160,000	86,500	6,410,200
Unit Alat Laboratorium	-	1,472,250	-	1,472,250
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-	120,000	-	120,000
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	990,000	165,000	-	1,155,000
Komputer Unit	66,989,649	15,646,692	-	82,636,341
Peralatan Komputer	37,888,312	743,375	-	38,631,687
Jumlah	330,067,329	115,980,868	6,777,557	439,270,640.00
Nilai Buku	46,438,003	262,425,009	13,555,114	76,901,276

Catatan :

- a) Mutasi Tambah Aset Tetap sebesar Rp 146.444.141 berasal dari transaksi-transaksi sebagai berikut:
- Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp Rp 39.094.226
 - Transaksi Ex. Puskesmas Kota dengan Berita Acara Nomor 028/153.2/1/2020 sebesar Rp 31.601.405, terdiri dari:
 - a. Penambahan Alat Kantor berupa Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 2.233.000
 - b. Penambahan Alat Rumah Tangga berupa Meubelair sebesar Rp 5.222.870 dan Alat Pendingin sebesar Rp 7.081.000
 - c. Penambahan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat berupa Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp 5.250.650
 - d. Penambahan Komputer Unit berupa Personal Jaringan sebesar Rp 11. 813.885
 - Transfer BKPM dengan BA Nomor 028/875.10/III/2020 sebesar Rp 39.395.512 terdiri dari:
 - a. Penambahan Alat Kantor berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 1.498.262
 - b. Penambahan Alat Rumah Tangga berupa Meubelair dan Alat Pendingin sebesar Rp 24.700.450 dan Rp 600.000
 - c. Meja dan Kursi/Rapat Pejabat berupa Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp 1.500.000
 - d. Alat Kedokteran berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp 11. 096.800
 - Transfer DINKES dengan BA Nomor 028/4457.8/XII/2020 sebesar Rp 36.352.998 terdiri dari:
 - a. Penambahan Alat Kantor berupa Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 4.050.000
 - b. Penambahan Alat Kedokteran berupa Alat Kedokteran Umum Rp 2.675.000, Alat Kedokteran Gigi Rp 14.250.000 dan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp 2.400.000
 - c. Penambahan Unit Alat Laboratorium berupa Alat Laboratorium Proses Pengelolaan Panas Rp 9.227.998, Alat Laboratorium Geofisika Rp 1.950.000
 - d. Penambahan Komputer Unit berupa Personal Jaringan sebesar Rp 11. 813.885
 - e. Penambahan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika berupa Measuring/Testing Device sebesar Rp 1.800.000
- b) Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp 6.777.557 berasal dari Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Rp 86.500 dan Barang Dilelang Rp 6.691.057

8 HUTANG BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2020</u> Audited
Jasa Pelayanan	53,748,942
Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	5,024,699
Jumlah	<u>58,773,641</u>

9 PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan BLUD Puskesmas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2020</u> Audited
Bayar	243,852,500
BPJS Kesehatan Kapitasi	1,121,955,300
BPJS Kesehatan Non Kapitasi	347,365,000
JAMKESDA	10,235,000
JAMPERSAL	11,070,000
Jumlah Pendapatan BLUD Puskesmas	<u>1,734,477,800</u>

10 PENDAPATAN HIBAH BLUD

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hibah BLUD untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2020</u> Audited
Pendapatan Hibah - Persediaan	9,638,000
Jumlah Pendapatan Operasional	<u>9,638,000</u>

11 PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hasil Kerjasama untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2020</u> Audited
Parkir	3,250,000
Jumlah Pendapatan Operasional	<u>3,250,000</u>

12 PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD YANG SAH

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Lain-lain BLUD yang Sah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 Audited
Bunga	284,664
Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim	1,213,679
Jumlah Pendapatan Operasional	1,498,343

13 BEBAN PEGAWAI

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 Audited
Honorarium Pengelola BLUD	
Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	99,104,303
Jumlah	99,104,303
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	
Beban Pegawai Dana BLUD	866,265,000
Jumlah	866,265,000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan PNS	229,387,776
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS	208,458,996
Jumlah	437,846,772
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	1,403,216,075

14 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 Audited
Beban Persediaan Barang Pakai Habis - Bahan	
Beban Persediaan Bahan Bangunan Dan Konstruksi	7,024,650
Beban Persediaan Bahan Kimia	6,045,000
Beban Persediaan Bahan Bakar Dan Pelumas	1,904,000
Beban Persediaan Bahan Baku	567,000
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	205,000
Beban Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	750,000
Beban Persediaan Isi Tabung Gas	5,975,000
Jumlah	22,470,650
Beban Persediaan Barang Pakai Habis - Suku Cadang	
Beban Persediaan Suku Cadang dan Alat Angkutan	25,000
Beban Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian	195,000
Jumlah	220,000
Beban Persediaan Barang Pakai Habis - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	14,159,868
Beban Persediaan Kertas Dan Cover	8,935,999
Beban Persediaan Bahan Cetak	4,863,000
Beban Persediaan Benda Pos	2,789,500
Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	20,948,040
Beban Persediaan Bahan Komputer	5,340,000
Beban Persediaan Perabot Kantor	26,348,828
Beban Persediaan Alat Listrik	12,147,200
Beban Survenir/ Cendera Mata	400,000
Beban Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25,067,800
Jumlah	121,000,235
Beban Persediaan Barang Pakai Habis - Obat-Obatan	
Beban Persediaan Obat	339,102,254
Beban Persediaan Obat-Obatan Lainnya	275,047,526
Jumlah	614,149,780

Natura Dan Pakan	
Natura	42,985,000
Jumlah	42,985,000
Persediaan Penelitian	
Persediaan Penelitian Lainnya	600,000
Jumlah	600,000
Beban Persediaan Barang Tak Habis Pakai - Pipa	
Beban Persediaan Pipa Plastik Pvc (Upvc)	3,544,000
Jumlah	3,544,000
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	804,969,665

15 BEBAN JASA

Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 Audited
Beban Jasa Kantor	
Beban Jasa Listrik	8,062,500
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	8,618,163
Beban Jasa paket/pengiriman	21,200
Beban Jasa Transaksi Keuangan	90,600
Beban Jasa Kebersihan	3,750,000
Beban Jasa Keamanan	650,000
Beban Transport dan akomodasi	6,500,000
Beban Jasa pembuatan software/aplikasi	4,950,000
Beban Jasa pertukangan	200,000
Beban Jasa pengolahan limbah	17,586,310
Beban Retribusi Sampah	600,000
Jumlah	51,028,773
Beban Premi Asuransi	
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	64,733,198
Jumlah	64,733,198
Beban Cetak dan Penggandaan	
Beban Penggandaan	3,719,300
Jumlah	3,719,300
Beban Makanan dan Minuman	
Beban makanan dan minuman harian pegawai	16,536,100
Beban makanan dan minuman rapat	11,281,000
Beban makanan dan minuman tamu	3,531,000
Beban makanan dan minuman pasien	34,044,292
Jumlah	65,392,392
Beban Barang Inventaris Non Kapitalisasi	
Beban Barang Inventaris Non Kapitalisasi Alat Kedokteran	337,113
Jumlah	337,113
JUMLAH BEBAN JASA	185,210,776

16 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 Audited
Beban Perawatan kendaraan bermotor	
Beban Penggantian suku cadang	234,500
Beban Bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1,108,000
Jumlah	1,342,500
Beban Pemeliharaan	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,841,500
Beban Pemeliharaan Alat-alat Berat	1,480,000
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	14,375,300

Beban Pemeliharaan Komputer	260,000
Beban Pemeliharaan Mebeulair	2,000,000
Beban Pemeliharaan Peralatan Dapur	380,000
Beban Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	3,438,000
Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	6,650,000
Jumlah	48,424,800
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	49,767,300

17 BEBAN PENYUSUTAN ASET

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan Aset untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 Audited
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
Beban Penyusutan Alat Ukur	360,000
Beban Penyusutan Alat Kantor	18,941,684
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	15,851,009
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	743,375
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1,050,130
Beban Penyusutan Alat Studio	1,536,316
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	7,897,860
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	160,000
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	1,472,250
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	120,000
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	165,000
Beban Penyusutan Komputer Unit	3,832,807
Jumlah	52,130,431

18 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 Audited
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	353,325
Jumlah	353,325

***BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN***

LAMPIRAN

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
JURNAL KOREKSI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KETERANGAN	REF	DEBIT	KREDIT
1	Persediaan Perabot Kantor		110,128	
	Persediaan Obat		40,657,322	
	Persediaan Obat-obatan lainnya		20,265,710	
	Koreksi Ekuitas-Saldo Awal Persediaan			61,033,160
	(Pencatatan atas persediaan awal)			
	Persediaan Perabot Kantor		1,122,818	
	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		60,000	
	Persediaan Obat		334,239,632	
	Persediaan Obat-obatan Lainnya		302,416,713	
	Koreksi Ekuitas - Persediaan Dropping			637,839,162
(Pencatatan atas Dropping/transfer dari DINKES)				
	Beban Perabot Kantor		691,337	
	Beban Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		60,000	
	Beban Persediaan Obat		336,603,154	
	Beban Persediaan Obat-obatan Lainnya		212,047,826	
	Persediaan Perabot Kantor			691,337
	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya			60,000
	Persediaan Obat			336,603,154
	Persediaan Obat-obatan Lainnya			212,047,826
	(Pencatatan Beban atas Dropping dan Saldo Awal)			
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		205,000	
	Persediaan Perabot Kantor		346,000	
	Persediaan Obat		90,000	
	Persediaan Obat-obatan Lainnya		8,997,000	
	Pendapatan Hibah BLUD - LO			9,638,000
	(Pencatatan Persediaan atas Hibah)			
	Beban Bahan/Bibit Tanaman		205,000	
	Beban Perabot Kantor		346,000	
	Beban Persediaan Obat		90,000	
Beban Persediaan Obat-obatan Lainnya		8,997,000		
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman			205,000	
Persediaan Perabot Kantor			346,000	
Persediaan Obat			90,000	
Persediaan Obat-obatan Lainnya			8,997,000	
(Pencatatan Beban atas Hibah Persediaan)				
2	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi		101,000	
	Persediaan Alat Tulis Kantor		1,922,500	
	Persediaan Kertas dan Cover		2,354,000	
	Persediaan Bahan Cetak		665,000	
	Persediaan Benda Pos		503,000	
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		2,125,000	
	Persediaan Perabotan Kantor		1,274,500	
	Persediaan Alat Listrik		200,000	
	Persediaan Survenir/ Cendera Mata		400,000	
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		790,000	
	Persediaan Obat-obatan Lainnya		46,123,000	
	Persediaan Natura		42,985,000	
	Persediaan Penelitian Lainnya		600,000	
	Koreksi Ekuitas - Persediaan BOK			100,043,000
	(Pencatatan atas realisasi dana BOK)			

NO	KETERANGAN	REF	DEBIT	KREDIT
3	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi		101,000	
	Beban AlatTulis Kantor		1,922,500	
	Beban Kertas dan Cover		1,694,000	
	Beban Bahan Cetak		565,000	
	Beban Benda Pos		503,000	
	Beban Dokumen/Administrasi Tender		2,125,000	
	Beban Perabotan Kantor		1,274,500	
	Beban Alat Listrik		200,000	
	Beban Survenir/ Cendera Mata		400,000	
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		790,000	
	Beban Obat-obatan Lainnya		46,123,000	
	Beban Natura		42,985,000	
	Beban Penelitian Lainnya		600,000	
	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi			101,000
	Persediaan AlatTulis Kantor			1,922,500
	Persediaan Kertas dan Cover			1,694,000
	Persediaan Bahan Cetak			565,000
	Persediaan Benda Pos			503,000
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			2,125,000
	Persediaan Perabotan Kantor			1,274,500
	Persediaan Alat Listrik			200,000
	Persediaan Survenir/ Cendera Mata			400,000
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			790,000
	Persediaan Obat-obatan Lainnya			46,123,000
	Persediaan Natura			42,985,000
	Persediaan Penelitian Lainnya			600,000
	(Pencatatan Beban atas Persediaan BOK)			
4	Koreksi Ekuitas - Persediaan BOK		760,000	
	Persediaan Kertas dan Cover			660,000
	Persediaan Bahan Cetak			100,000
	(Koreksi Lebih Catat Persediaan BOK)			
5	Ekuitas Lain-lain		284,183,178	
	Ekuitas Awal			284,183,178
	(Reklas atas Ekuitas Lain-lain terhadap Ekuitas Awal)			
6	Piutang BLUD - BPJS Kesehatan		44,010,000	
	Pendapatan BLUD Puskesmas - Non Kapitasi			44,010,000
	(Pencatatan atas Piutang BPJS bulan September s/d Desember)			
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		220,050	
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah			220,050
	(Pencatatan atas Penyisihan Piutang)			
7	Beban Pegawai Dana BLUD - Jasa Pelayanan		53,748,942	
	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan			53,748,942
	(Pencatatan atas Hutang Jasa Pelayanan)			
	Beban Honorarium Pengelola BLUD		5,024,699	
	Hutang Honorarium Pengelola Dana BLUD			5,024,699
	(Pencatatan atas Hutang Insentif Manajemen)			
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		1,498,262	
	Alat Kantor Lainnya		4,050,000	
	Meubelair		24,700,450	
	Alat Pendingin		600,000	
	Meja Kerja Pejabat		1,500,000	
	Alat Kedokteran Umum		2,675,000	
	Alat Kedokteran Gigi		14,250,000	

NO	KETERANGAN	REF	DEBIT	KREDIT
	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan		13,496,800	
	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		9,227,998	
	Alat Laboratorium Geofisika		1,950,000	
	Measuring/Testing Device		1,800,000	
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor			1,498,262
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga			25,300,450
	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			1,500,000
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran			8,877,440
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap DINKES			38,572,358
	(Transfer Aset Tetap dari DINKES)			
9	Beban Barang Inventaris Non Kapitalisasi Alat Kedokteran		337,113	
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap DINKES			337,113
	(Transfer Ekstrakom dari DINKES)			
10	Beban Penyusutan Alat Kantor		810,000	
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran		6,084,360	
	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium		1,397,250	
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		120,000	
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor			810,000
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran			6,084,360
	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium			1,397,250
	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika			120,000
	(Beban Penyusutan Aset Tetap)			
	JUMLAH		1,939,320,742	1,939,320,742